

# ISU Sepekan

**BIDANG HUKUM**

Minggu ke-4 Oktober 2021 (22 s.d. 28 Oktober 2021)

## KINERJA PENEGAKAN HUKUM DI 2 TAHUN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-MA'RUF AMIN



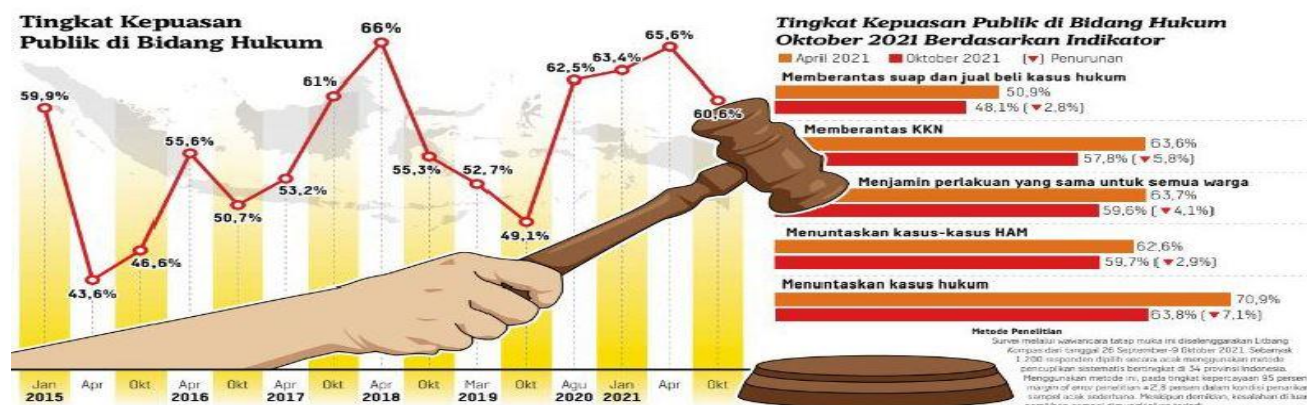
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.  
Peneliti Madya/Hukum Tata Negara  
shanti.kartika@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Penegakan hukum menjadi salah satu indikator kinerja Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kinerja penegakan hukum tahun 2021 menunjukkan penurunan setelah April 2021. Namun, masyarakat memberikan bentuk penghormatan hukum kepada Presiden atas kinerja penegakan hukum, karena tidak ada intervensi dalam penegakan hukum, penggunaan amnesti sebagai hak konstitusional Presiden, dan tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap penegakan hukum, *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC) telah melakukan survei. Hasil survei menunjukkan penegakan hukum dalam kondisi baik atau sangat baik (44,8%); penegakan hukum buruk (24,8%); penegakan hukum sedang (27,2%); dan tidak memberikan penilaian (3,1%). Penilaian berbeda untuk pemberantasan korupsi, yang menunjukkan 24,9% pemberantasan korupsi dalam kondisi baik atau sangat baik, sedangkan 48,2% menilainya buruk atau sangat buruk.

Hasil survei tersebut berbeda dengan Survei Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh Balitbang Kompas. Salah satu hal menarik dari survei ini adalah tingkat kepuasan publik di bidang hukum. Secara garis besar, kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum turun dari 65,6% pada April 2021 menjadi 60,6% pada Oktober 2021. Berdasarkan data dari Balitbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum sangat fluktuatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 (Gambar 1).



Gambar 1. Kepuasan Publik di Bidang Hukum  
Sumber: Kompas, 18 Oktober 2021.

Berdasarkan beberapa indikator pada Gambar 1, kinerja penegakan hukum ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap hukum, yang dipengaruhi oleh upaya pemberantasan korupsi; polemik kepegawaian KPK; citra positif dari lembaga penegak hukum; serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi lembaga penegak hukum. Di sisi lain, ada peningkatan upaya pemberantasan korupsi yang tidak lagi dititikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga aspek pencegahan yang diatur Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dijalankannya Stranas PK ini menunjukkan pemerintahan saat ini mempunyai komitmen kuat untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan laporan Stranas PK, ada kemajuan dalam pencegahan korupsi dilihat dari capaian setiap fokus di triwulan I 2021 dan triwulan II 2021 sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

**Tabel 1.** Capaian Stranas PK Tahun 2021

Fokus	Triwulan I	Triwulan II
pemanfaatan data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19	18%	22,5%
percepatan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	20%	25%
penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik	7,4%	11,66%
penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pemangkasan birokrasi, serta peningkatan layanan di kawasan Pelabuhan	0%	13%

Sumber: *Media Indonesia*, 21 Oktober 2021.

Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kendala dalam implementasi Stranas PK. Kendala tersebut, kesatu, belum semua daerah mempunyai unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPJB); kedua, kurangnya dukungan sumber daya manusia dan keterbatasan sistem teknologi informasi; ketiga, belum diterapkannya elektronik katalog lokal di setiap daerah; keempat, rendahnya komitmen pimpinan daerah untuk melakukan reformasi birokrasi dengan berorientasi pelayanan dan penerapan merit sistem; kelima, masih adanya jual beli jabatan.

 SUMBER

Media Indonesia, 21 Oktober 2021; Kompas, 18 dan 22 Oktober 2021.

